

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1.1. Pengertian Akuntansi

A Statement of Basic Accounting Theory (ASOBAT), akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternative dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya

Menurut komite istilah American Institute of Certified Public Accounting (AICPA) mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil hasilnya.

Menurut Niswonger dkk (1999), akuntansi adalah system informasi yang memberikan laporan kepada pihak-pihak berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. System akuntansi mencatat data ekonomi mengenai kegiatan perusahaan dan hal-hal yang terjadi pada perusahaan, yang hasilnya dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kebutuhan informasi mereka.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu aktivitas yang memberikan informasi yang jelas untuk evaluasi dalam pengambilan keputusan bisnis.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.2. Pengertian Akuntansi Syariah

Menurut Muhammad (2002:11) definisi akuntansi syariah yang terpenting adalah apakah didalam proses akuntansi terjadi implikasi atas nilai-nilai yang dikandung dalam ayat-ayat Al-Quran.

Menurut Yaya dkk (2012:2) Praktik akuntansi pada masa Rasulullah mulai berkembang setelah ada perintah Allah SWT melalui Al-Quran untuk mencatat transaksi yang bersifat tidak tunai (Al-baqarah ayat 282 ) dan untuk membayar zakat (Al-Quran 2:110, 177; 9:18;71;22:78;58:13)

Ayat diatas menunjukan kewajiban bagi orang beriman untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan dan belum tuntas perintah dalam ayat ini adalah untuk menjaga kebenaran dan keadilan, maksudnya perintah ini ditekankan pada kepentingan pertanggung jawaban agar pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ini tidak diinginkan. Sehingga tidak menimbulkan konflik. Ayat ini juga menggambarkan angka keseimbangan atau neraca.

Secara sederhana, pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimiliki yaitu akuntansi dan syariah. Akuntansi syariah adalah proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan Allah SWT. Oleh sebab itu, akuntansi syariah diperlukan untuk mendukung kegiatan yang harus dilakukan sesuai syariah, karena tidak mungkin dapat menerapkan akuntansi yang sesuai dengan syariah jika transaksi yang dicatat oleh proses akuntansi tersebut tidak sesuai dengan syariah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2014:2) akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Akuntansi syariah diperlukan untuk mendukung kegiatan yang harus dilakukan sesuai syariah, karena tidak mungkin dapat menerapkan akuntansi yang sesuai syariah jika transaksi yang akan dicatat oleh proses akuntansi tersebut tidak sesuai dengan syariah

### 1.3.Prinsip Umum Akuntansi Syariah

Menurut Muhammad (2002:11) nilai pertanggung jawaban, keadilan dan kebenaran selalu melekat dalam system akuntansi Syariah.Ketiga nilai tersebut tentu saja telah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syariah. Berikut uraian ketiga prinsip yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282

#### a. Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban (accountability) merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim.Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang Khaliq mulai dari dalam kandungan. Banyak ayat Al\_quran yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah dimuka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawabannya dalam bentuk laporan akuntansi.

#### b. Prinsip Keadilan

Jika ditafsirkan lebih lanjut, ayat 282 surat Al-Baqarah mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi akuntansi. Dalam konteks akuntansi, menegaskan kata adil dalam ayat 282 surat Al-Baqarah secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. Misalnya, bila nilai transaksi adalah sebesar Rp 100juta, maka akuntansi (perusahaan) akan mencatat dengan jumlah yang sama. Dengan kata lain, tidak ada window dressing dalam praktik akuntansi perusahaan.

Dengan demikian, kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: pertama, adalah berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral). Pengertian dua inilah yang lebih merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi (alternative) yang lebih baik.

#### c. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat lepas dari prinsip keadilan. Sebagai contoh misalnya, dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Aktifitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

Kebenaran didalam Al-Quran tidak diperbolehkan untuk dicampur adukkan dengan kebathilan. Namun, barangkali ada pertanyaan dalam diri kita, siapakah yang berhak menentukan kebenaran? Alat operasional apa yang dapat dijadikan ukuran tujuan praktis kebenaran? Untuk hal ini kita masih terkendala. Namun sebagai muslim, selayaknya kita tidak risau atas hal tersebut. Sebab Al-Quran telah menggariskan, bahwa ukuran, alat atau instrument untuk menetapkan kebenaran tidaklah didasarkan pada nafsu.

### 1.4. Laporan Keuangan

#### a. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Veithzal dan Arviyan (2010:876) Laporan keuangan adalah laporan periodic yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum tentang status keuangan dari individu, asosiasi, atau organisasi bisnis yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas pemilik.

Menurut Dwi (2010:123) Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan.

**b. Tujuan Laporan Keuangan**

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No.101, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam mengambil keputusan.

Selain itu, menurut Rizal (2014:74) tujuan lainnya adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha
- 2) Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi asset, kewajiban, pendapatan, dan beban tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada, serta bagaimana perolehan dan penggunaannya.
- 3) Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikan pada tingkat keuntungan yang layak; dan
- 4) Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanaman modal dan pemilik dana syirkah temporer serta informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi social entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi:

- a. Asset
- b. Liabilitas
- c. Dana syirkah temporer
- d. Ekuitas
- e. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian
- f. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik
- g. Arus kas
- h. Dana zakat
- i. Dana kebajikan

Informasi tersebut serta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan dan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen berikut ini:

- a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode
- b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode
- c. Laporan perubahan ekuitas selama periode
- d. Laporan arus kas selama periode

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Laporan perubahan dana investasi terikat
- f. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil
- g. Laporan sumber dan dana zakat selama periode
- h. Laporan sumber dan dana kebajikan selama periode
- i. Catatan atas laporan keuangan

### 1.5. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Menurut Harahap (2009:107), neraca atau daftar neraca disebut juga laporan posisi keuangan perusahaan. Laporan ini menggambarkan posisi asset, kewajiban dan ekuitas pada saat tertentu. Neraca atau balance sheet adalah laporan yang menyajikan sumber-sumber ekonomis dari suatu perusahaan atau asset kewajibannya atau hutang, dan hak para pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan tersebut atau ekuitas pemilik suatu saat tertentu. Neraca harus disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan. Oleh karena itu neraca tepatnya dinamakan *statement of financial position*. Karena neraca merupakan potret atau gambaran keadaan pada suatu saat tertentu maka neraca merupakan *status report* bukan merupakan *flow report*.

Sedangkan menurut PSAK 101 Pos neraca memberi informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Unsure yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Asset, adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masalalu dan memiliki manfaat ekonomi dimasa depan bagi entitas syariah
- Kewajiban merupakan utang entitas syariah masa kini yang timbul akibat dari peristiwa masalalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung masalah ekonomi.
- Dana Syirka Temporer (DST) merupakan dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lain yang mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan
- Ekuitas merupakan hak residul atas asset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana syirka temporer

**Gambar 2.1**

Laporan Posisi Keuangan Menurut PSAK No. 101

Bank Syariah X			
Laporan Posisi Keuangan			
Per 31 Desember 20xx			
<b>ASET</b>	xxx	<b>LIABILITAS</b>	
Kas	xxx	Liabilitas segera	Xxx
Penempatan pd Bank Indonesia	xxx	Bagi hasil yg blm dibagikan	Xxx
Investasi pada bank lain	xxx	Simpanan	Xxx
Investasi pada surat berharga	xxx	Simpanan dari bank lain	Xxx
Piutang:		Utang:	
Murabahah	xxx	Salam	Xxx
Istishna'	xxx	Istishna'	Xxx
Ijarah	xxx	Liabilitas kpd bank lain	Xxx
Pembiayaan:		Pembiayaan yg diterima	Xxx
Mudharabah	xxx	Utang pajak	Xxx
Musyarakah	xxx	Pinjaman subordinasi	Xxx

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tagihan akseptasi	Xxx	Jumlah	Xxx
Persediaan	Xxx		
Aset ijarah	Xxx		
Aset istishna' dlm penyelesaian	Xxx		
Piutang salam	Xxx	<b>DANA SYIRKAH TEMPORER</b>	
Investasi pada entitas lain	Xxx	Dana syirkah temporer dr bukan bank:	
Aset tetap	Xxx	Tabungan mudharabah	Xxx
		Deposito mudharabah	Xxx
		Dana syirka temporer dari bank:	
		Tabungan mudharabah	Xxx
		Deposito mudharabah	Xxx
		Musarakah	Xxx
		Jumlah	Xxx
		<b>EKUITAS</b>	
		Ekuitas pemilik entitas induk	Xxx
		Modal disetor	Xxx
		Tambahan modal disetor	Xxx
		Penghasilan komprehensif	Xxx
		Saldo laba	Xxx
		Kepentingan non pengendalian	Xxx
		Jumlah	Xxx
		Jumlah liabilitas,	
Jumlah asset	Xxx	Dana syirkah temporer, dan ekuitas	Xxx

Sumber: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101

### 1.6. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Menurut munawir (2010:26), laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, beban, laba rugi, yang diperoleh suatu perusahaan selama periode tertentu.

Komponen-komponen laporan laba rugi bank syariah disusun dengan mengacu pada PSAK untuk pos-pos umum. Dengan memperhatikan ketentuan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam PSAK terkait, bank syariah menyajikan laporan laba rugi yang mencakup, tetapi tidak terbatas, pada pos-pos berikut:

- a) Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib:
  - (i) Pendapatan dari jual beli:
    1. pendapatan marjin murabahah;
    2. pendapatan neto salamparalel;
    3. pendapatan neto istishna'paralel;
  - (ii) Pendapatan dari sewa;
    1. pendapatan neto ijarah;
  - (iii) Pendapatan dari bagi hasil:
    1. pendapatan bagi hasil mudharabah
    2. pendapatan bagi hasil musyarakah;
  - (iv) Pendapatan usaha utama lainnya;
- b) Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer;
- c) Pendapatan usaha lainnya;
  - (i) Pendapatan imbalan (*fee*) jasa perbankan;
  - (ii) Pendapatan imbalan investasi terikat.
- d) Beban usaha;
- e) Laba atau rugi usaha;
- f) Pendapatan nonusaha;
- g) Beban non-usaha;
- h) Beban pajak; dan
- i) Laba atau rugi neto.

### Gambar 2.2

## Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Menurut PSAK No.101

Bank syariah X	
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	
Per 1 Januari s.d. 31 Desember 20xx	
<b>PENDAPATAN PENGELOLA DANA SEBAGAI MUDHARIB</b>	
Pendapatan dari jual beli:	
Pendapatan margin murabahah	xxx
Pendapatan neto salam parallel	xxx
Pendapatan neto istishna' parallel	xxx
Pendapatan dari sewa:	
Pendapatan neto ijarah	xxx
Pendapatan dari bagi hasil:	
Pendapatan bagi hasil mudharabah	xxx
Pendapatan bagi hasil musyarakah	xxx
Pendapatan usaha utama lain	xxx
Jumlah	xxx
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(xxx)
Hak bagi hasil milik bank	xxx
<b>PENDAPATAN USAHA LAIN</b>	
Pendapatan imbalan jasa perbankan	xxx
Pendapatan imbalan investasi terikat	xxx
Jumlah	xxx
<b>BEBAN USAHA</b>	
Beban kepegawaian	(xxx)
Beban administrasi	(xxx)
Beban penyusutan dan amortisasi	(xxx)
Beban usaha lain	(xxx)
Jumlah	xxx
<b>LABA USAHA</b>	xxx
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN NON USAHA</b>	
Penghasilan non usaha	xxx
Beban non usaha	(xxx)
Jumlah	xxx



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	xxx
Beban pajak penghasilan	(xxx)
<b>LABA NETO</b>	xxx
Laba netto yang dapat diatribusikan kepada:	
Pemilik entitas induk	xxx
kepentingan nonpengendalian	xxx
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	
Surplus revaluasi	Xxx
Keuntungan/kerugian actuarial	Xxx
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	Xxx
Penyesuaian nilai waja asset keuangan "tersedia untuk dijual"	Xxx
Jumlah	Xxx
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF</b>	Xxx
Laba komprehensif yg dapat diatribusikan kepada:	
Pemilik entitas induk	xxx
Kepentingan non pengendalian	xxx

Sumber: Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No.101

## 2.7.Akuntansi Murabahah

### a. Pengertian Murabahah

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 2013) dalam pernyataan standar akuntansi (PSAK) 102, murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkap biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5). Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari (PSAK 102 Paragraf 8)

Menurut Ahmad (2010:170), murabahah adalah pembiayaan saing menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba rugi *shahib al-mal* dan pengembaliaannya dilakukan secara tunai atau angsur.

Menurut Muhamad (2013:145), murabahah adalah penjualan barang dengan biaya pokok dan tambahan kenaikan harga pada harga pokok dengan pembayaran dilakukan secara tangguh atau mencicil. Transaksi murabahah menggunakan dasar akad tawarruq, sehingga dalam akad ini pembelian komoditas dengan pembiayaan tertunda diikuti penjualan komoditas tersebut kepada pihak ketiga.

Menurut Fathurrahman (2013:109), pengertian murabahah dalam praktik adalah apa yang diistilahkan dengan *bai al-murabahah liamir bisy-syira*, yaitu permintaan seseorang atau pembeli terhadap orang lain untuk membeli barang dengan cirri-ciri yang ditentukan. Untuk singkatannya bentuk ini dinamakan *Murabahah* Permintaan/Pesanan Pembeli (MPP). MPP ini merupakan dasar kesepakatan dari terjadinya transaksi jual beli barang permintaan/pesanan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dianggap bersifat lazim (pasti/mengikat) bagi pemesan. Sedangkan besarnya keuntungan, harga jual, penyerahan barang, dan cara pembayaran dalam MPP ini ditentukan atas kesepakatan para pihak.

Menurut Bambang (2008:63), murabahah adalah akad jual beli dimana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Jenis dan jumlah barang dijelaskan dengan rinci. Barang diserahkan setelah akad jual beli dan pembayaran bisa dilakukan secara mengangsur/ cicilan atau sekaligus.

Dalam murabahah, Baitul Mal wat Tamwil (BMT) dapat bertindak sebagai penjual dan juga pembeli. Sebagai penjual apabila Baitul Mal wat Tamwil (BMT) menjual barang kepada nasabah, sedangkan sebagai pembeli apabila Baitul Mal wat Tamwil membeli barang kepada supplier untuk dijual kembali kepada nasabah (Wiyono, 2005:8). Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak lembaga keuangan syariah ataupun BMT dan nasabah. Dalam murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu (Sudarsono, 2008:69)

#### **b. Rukun Transaksi Murabahah**

Menurut Rizal (2014:158-161), rukun transaksi murabahah meliputi transaktor, yaitu adanya pembeli (nasabah) dan penjual (bank syariah), objek akad murabahah yang didalamnya terkandung barang dan harga, serta ijab Kabul berupa pernyataan kehendak masing-masing pihak, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Transaktor

Adanya pihak yang bertransaksi (transaktor) merupakan rukun transaksi murabahah. Transaktor dalam transaksi murabahah terdiri atas pembeli (yaitu nasabah yang memerlukan barang) dan penjual (yaitu bank syariah). Dalam fikih muamalah, transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil baligh dan kemampuan memilih yang optimal, seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lainnya.

Adapun untuk transaksi dengan anak kecil, dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Terkait dengan jual beli, DSN membolehkan bank meminta nasabah untuk membayar uang muka (urbun) saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Kebijakan meminta uang muka diterapkan secara ketat pada transaksi murabahah yang pembelian asetnya dilakukan oleh bank. Pada umumnya nilai uang muka diterapkan adalah 30% dari harga perolehan. Penerapan uang muka pada dasarnya adalah untuk menguji kemampuan financial nasabah pada saat transaksi murabahah dilaksanakan.

## 2. Objek Murabahah

Rukun objek akad transaksi murabahah meliputi barang dan harga barang yang diperjual belikan. Terkait dengan barang, fatwah DSN Nomor 4 menyatakan bahwa dalam jual beli murabahah, barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang diharamkan oleh syariah islam. DSN mensyaratkan bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan harus menyampaikan semua



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal yang berkaitan dengan pembelian kepada nasabah, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

### 3. Ijab dan Kabul

Ijab dan Kabul merupakan pernyataan kehendak para pihak yang bertransaksi, baik secara lisan, tertulis atau secara diam-diam. Akad murabahah memuat semua hal yang terkait dengan posisi serta hak dan kewajiban bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Akad ini bersifat mengikat bagi kedua belah pihak dan mencantumkan berbagai hal, antara lain ssebagai berikut :

- Nama notaries serta informasi tentang waktu dan tempat penandatanganan akad
- Identitas pihak pertama, dalam hal ini nasabah yang mewakili bank syariah (biasanya kepala cabang)
- Identitas pihak kedua, dalam hal ini nasabah yang akan membeli barang dengan didampingi oleh suami/istri yang bersangkutan sebagai ahli waris.
- Bentuk akad serat penjelasan akad.
- Kesepakatan-kesepakatan yang disepakati.

#### c. Jenis dan Ketentuan Akad Murabahah

Murabahah menurut jenisnya, Karim (2008:115) menjelaskan bahwa, murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah). Transaksi melalui pesanan ini adalah sah dalam fiqih islam, antara lain dikatakan oleh Imam Muhammad Ibnu-Hasan Al-syaibani, Imam Syafi'I, dan Imam Ja'far Al-shiddiq.

Ketentuan-ketentuan murabahah kita dapatkan pada sabdah Rasulullah SAW riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban yang dikutip dari Fatwa DSN Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah *“dari Abu Sa'id Al-khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka” hadist riwayat ‘Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam “Rasulullah SAW ditanya tentang urbun(uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya”*

Berikut kutipan yang menjelaskan ketentuan akan penundaan pembayaran dari Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:17/DSN-MUI/IV/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, Hadis Nabi riwayat 'Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam *“menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu, menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”* Hadis riwayat jama'ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Nasa'I dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darami dari Abu Hurairah)

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“*menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman.*” Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Huraira

Ketentuan umum murabahah juga dijelaskan Antonio (2007:105) dengan klasifikasi sebagai berikut:

#### 1) Jaminan.

Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan tidak main-main dengan pesanan. Si pembeli (penyedia pembiayaan/bank) dapat meminta si pemesan (pemohon/nasabah) suatu jaminan (*rahn*) untuk dipegangnya.

#### 2) Utang dalam Murabahah kepada Pesanan Pembelian (KPP).

Secara prinsip, penyelesaian utang si pemesan dalam transaksi murabahah KPP tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan si pemesan kepada pihak ketiga atas barang pesanan tersebut. Apakah si pemesan menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban menyelesaikan utangnya kepada si pembeli.

#### 3) Penundaan Pembayaran oleh Debitor Mampu.

Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam *al-murabahah* ini. Bila seorang pemesan menunda penyelesaian utang tersebut, pembeli dapat mengambil tindakan: mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali utang itu dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan. Sabda Rasulullah

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SAW “Yang melalaikan pembayaran utang (padahal ia mampu) maka dapat dikenakan sanksi dan dicemarkan nama baiknya (semacam black list).”

#### 4) Bangkrut

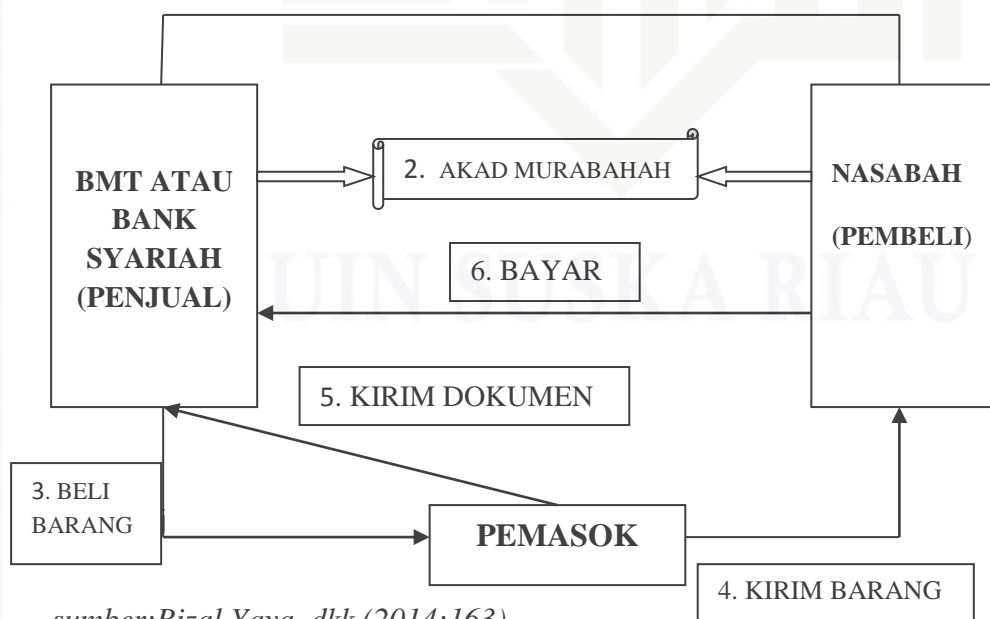
Jika pemesan yang berutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai sedangkan ia mampu, kreditor harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 280 “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, berilah tangguh sampai dia berkelapangan....”

#### d. Alur Transaksi Murabahah

Gambar 2.3

#### Alur Transaksi Murabahah

##### 1. NEGOSIASI



sumber: Rizal Yaya, dkk (2014:163)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Pertama**, dimulai dari pengajuan pembelian barang oleh nasabah. Pada saat itu nasabah menegosiasikan harga barang, margin, jangka waktu pembayaran, dan besar angsuran perbulan.

**Kedua**, BMT atau bank sebagai penjual selanjutnya mempelajari kemampuan nasabah dalam membayar piutang murabahah. Apabila rencana pembelian barang tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, maka dibuatlah akad murabahah. Isi akad murabahah setidaknya mencakup berbagai hal agar rukun murabahah dipenuhi dalam transaksi jual beli yang dilakukan.

**Ketiga**, setelah akad disepakati pada murabahah dengan pesanan, BMT atau bank selanjutnya melakukan pembelian barang pada pemasok. Akan tetapi, pada murabahah tanpa pesanan bank dapat langsung menyerahkan barang kepada nasabah karena telah memilikinya terlebih dahulu. Pembelian barang terhadap pemasok dalam murabahah dengan pesanan dapat diwakilkan kepada nasabah atas nama bank. Dokumen pembelian barang tersebut diserahkan oleh pemasok kepada bank.

**Keempat**, barang yang diinginkan oleh pembeli selanjutnya diantar oleh pemasok kepada nasabah pembeli.

**Kelima**, setelah menerima barang, nasabah pembeli selanjutnya membayar kepada bank, pembayaran kepada bank biasanya dilakukan dengan cara mencicil sejumlah uang tertentu selama jangka waktu yang disepakati.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## e. Perlakuan Akuntansi Murabahah Menurut PSAK No.102

### Pengakuan Pengukuran

Dalam PSAK No.102 dinyatakan bahwa pengakuan dan pengukuran murabahah sebagai berikut (IAI,2013):

1. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut:
  - a. Jika murabahah pesanan mengikat, maka dinilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai asset.
  - b. Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
2. Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai:
  - a. pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah;
  - b. kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli;
  - c. tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual; atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad.
3. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat:
  - a. dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian; atau
  - b. dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.
4. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.
5. Keuntungan murabahah diakui:
  - a. pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau
  - b. selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahah-nya:
    1. Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. Metode ini diterapkan untuk murabahah tangguh dimana risiko penagihan kas

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.

2. Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.
3. Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktek, metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.
6. Pengakuan keuntungan dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset murabahah.
7. Berikut ini contoh perhitungan keuntungan secara proporsional untuk suatu transaksi murabahah dengan biaya perolehan aset (pokok) Rp 800,00 dan keuntungan Rp 200,00; serta pembayaran dilakukan secara angsuran selama 3 tahun; dimana jumlah angsuran, pokok dan keuntungan yang diakui setiap tahun adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 2.1**  
Contoh Perhitungan Keuntungan Proporsional

Tahun	Angsuran (Rp)	Pokok (Rp)	Keuntungan (Rp)
1	500,00	400,00	100,00
2	300,00	240,00	60,00
3	200,00	160,00	40,00

Sumber: PSAK 102 (2007:102.7)

8. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.
9. Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:
  - a. diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah; atau
  - b. diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.
10. Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut:
  - a. jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah;
  - b. jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.
11. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:

- a. uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
- b. jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);
- c. jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

**Prinsip Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi untuk Pembeli Akhir**

1. Hutang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai hutang murabahah sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan).
2. Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan.
3. Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang murabahah.
4. Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan hutang murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan.
5. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.

**Prinsip Penyajian Akuntansi Murabahah**

1. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.
2. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah.
3. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) hutang murabahah.

**Prinsip Pengungkapan Akuntansi Murabahah**

1. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:
  - a. harga perolehan aset murabahah;
  - b. janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan
  - c. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah.
2. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:
  - a. nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah
  - b. jangka waktu murabahah tangguh.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

## **2.8. Baitul Mal wat Tamwil (BMT)**

### **a. Pengertian Baitul Mal wat Tamwil (BMT)**

Menurut Hertanto (2000:81), Baitul Mal wat Tamwil (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan. Istilah BMT adalah penggabungan dari baitul mal dan baitul tamwil. Baitul mal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (social). Sumber dana diperoleh dari zakat, infaq, dan sedekah, atau sumber lain yang halal. Kemudian, dana tersebut disalurkan kepada mustahik, yang berhak, atau untuk kebaikan. Adapun baitul tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat profit motive. Penghimpunan dana di peroleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi, yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

Menurut Muhammad (2007:59) Baitul Mal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga ekonomi dan keuangan yang dikenal luas pada masa-masa awal. BMT yang berkembang pada masa-masa awal kejayaan Islam berfungsi sebagai pengamat ekonomi disejajarkan dengan lembaga yang menjalankan fungsi perekonomian modern, bank sentral. Keberadaan BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah mengalami dinamika yang bagus seiring dengan dinamika dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan Islam lainnya di tanah air. Munculnya lembaga keuangan mikro syariah seperti



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BMT merupakan salah satu multiplier effect dari pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan bank syariah. Lembaga ekonomi ini lebih dekat dengan kalangan masyarakat bawah.

BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

**b. Prinsip Utama Baitul Mal wat Tamwil(BMT)**

Menurut Soemitra (2010:453) Baitul Mal wat Tamwil (BMT) memiliki prinsip-prinsip utama, yaitu:

- a. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah islam kedalam kehidupan nyata
- b. Keterpaduan (kaffah) dimana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia.
- c. Kekeluargaan (kooperatif)
- d. Kebersamaan
- e. Kemandirian
- f. Profesionalisme
- g. Istiqomah: konsisten

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**c. Ciri-ciri Utama Baitul Mal wat Tamwil (BMT)**

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya
- b. Bukan lembaga social tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infaq, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat disekitar.
- d. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang arang dari luar masyarakat itu.

**d. Fungsi Baitul Mal wat Tamwil (BMT)**

menurut Nurul dan Mohamad (2010:363) Baitul Mal wat Tamwil (BMT)

memiliki beberapa fungsi, diantaranya:

- a. Penghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT uang tersebut dapat ditingkatkan kualitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana lebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana)
- b. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
- c. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan member pendapatan kepada para pengawas.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pemberi informasi, member informasi kepada masyarakat mengenai resiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
- e. Sebagai suatu lembaga keuangan mikro islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKMK tersebut.

**2.9. Penelitian Terdahulu**

No	NamaPeneliti	Judul	HasilPenelitian
1.	Umi Fauzul Naimah dan Murtadho Ridwan (2014) Jurnal STAIN Kudus	Analisis Implementasi Akuntansi Syariah di BMT "X" Kudus	Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi akuntansi syariah dalam penyajian laporan keuangan BMT 'X' Kudus belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 101. Hal ini disebabkan karena Neraca BMT 'X' Kudus belum memisahkan antara kewajiban dengan Dana Syirkah Temporer (DST).
2.	Hariyanto (2015) Jurnal IAIN Antasari Banjarmasin	Perlakuan Akuntansi Syariah PSAK No.102 Pada BMT Ummah Banjarmasin	Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlakuan akuntansi syariah PSAK No.102 pada BMT Ummah tentang perlakuan akuntansi murabahah sebagian besar sudah sesuai, akan tetapi belum memenuhi PSAK No.102. Hal ini dapat dibuktikan beberapa yang masih perlu dilakukan perbaikan seperti belum adanya perlakuan akuntansi urbun murabahah, perlakuan akuntansi potongan

© Hak cipta

milik UIN Suska Riau

State Islamic

University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			pelunasan dini, dan tidak adanya denda pada saat anggota (nasabah) tidak bisa membayar cicilan
3.	Inggrid Eka Pratiwi dan Dina Fitriasia Septiarini (2014) Universitas Airlangga	Analisis Penerapan PSAK – 102 Murabahah (Studi Kasus pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri)	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa BMT Rahmat Syariah dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan kesepakatan kontrak awal tidak sesuai dengan PSAK 102. Selama proses kontrak, dalam hal pengukuran murabahah keuntungan yang sesuai dengan PSAK 102, tetapi dalam hal pengakuan, penyajian, dan pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 102. Sedangkan dalam pengakuan, pengukuran dan pengungkapan denda (ta'zir), Pada saat pembayaran pengukuran yang sesuai dengan PSAK 102, Namun, pengakuan, representasi, dan pengungkapan yang tidak sesuai dengan PSAK 102
4.	Hana Rahmanida (2015) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Penerapan PSAK No.101 Pada Penyusunan Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri	Dari hasil penelitian diketahui bahwa prosedur penyusunan laporan keuangan secara umum pada BSM terdiri atas dua tahap. Pertama pembuatan Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK) berbasis XBRL yang merupakan penyempurnaan dari system sebelumnya LBUS (Laporan Bank Umum



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Syariah). Kedua, pembuatan laporan secara manual dalam bentuk excel yang digunakan sebagai alat control LSMK. BSM juga telah menerapkan PSAK No.101 dengan baik khususnya pada laporan dana zakat dan dana kebajikan
5.	Sholikhul Hidayat (2013) Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISNU Jepara	Penerapan Akuntansi Syariah Pada BMT Lisa Sejahtera Jepara	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun BMT Lisa Sejahtera sudah berpola syari'ah akan tetapi produk atau jenis – jenis usahanya tidak sesuai dengan PSAK Syari'ah. Dengan demikian pencatatan transaksi keuangannya berbeda dengan ketentuan yang ada pada PSAK Syari'ah 101 yang meliputi Neraca, Laba Rugi, Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber dan Penggunaan Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebijakan dan Catatan atas Laporan Keuangan